

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UMKM



**Gambar 1. 1 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung**

*Sumber: <http://diskopumkm.bandung.go.id> 2018*

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan Wajib adalah bidang Koperasi dan UMKM. Tujuan dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM ini adalah; 1) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. 2) Bandung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

## **1.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung**

### **1.1.2.1 Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung**

Terwujudnya Koperasi, UKM, yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang kokoh, maju dan berkeadilan.

### **1.1.2.2 Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung**

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM.
2. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

## **1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

### 1) Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

### 2) Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

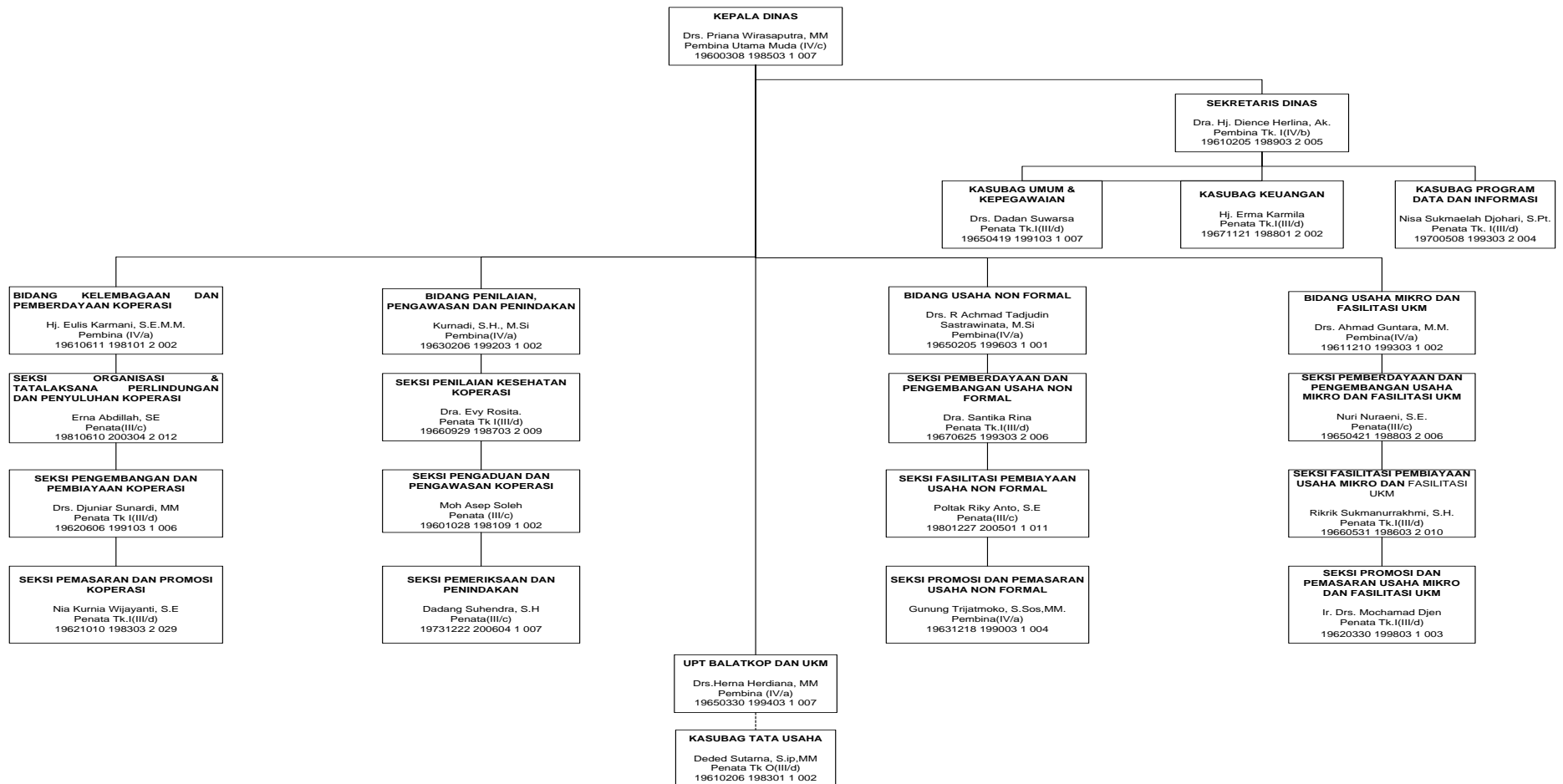
#### **1.1.4 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris, membawahkan :
  - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- C. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, membawahkan :
  - 1) Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi;
  - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pembiayaan Koperasi;
  - 3) Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Koperasi.
- D. Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan, membawahkan:
  - 1) Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  - 2) Kepala Seksi Pengaduan dan Pengawasan Koperasi;
  - 3) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Koperasi.
- E. Bidang Usaha Non Formal, membawahkan:
  - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal;
  - 2) Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Non Formal;
  - 3) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Non Formal.
- F. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM, membawahkan:
  - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;

- 2) Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;
  - 3) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM.
- G. Kepala UPT Balatkop dan UKM, membawahkan :
- 1.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, bidang yang menaungi UMKM adalah Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM oleh Ibu Rikrik Sukmanurrahmi. Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 1. 2** Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung 2018*

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah berkembang pesat di dunia. Hadirnya era digital ini membuat masyarakat memiliki perubahan pada gaya hidup menjadi digital. Berkembangnya teknologi saat ini sudah membantu hampir seluruh kebutuhan manusia dengan mempermudah melakukan pekerjaan.

Pemahaman manusia dalam mengikuti perkembangan teknologi sangat baik seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Jumlah populasi yang tinggi juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Internet merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi. Menurut Oetomo (2002) internet merupakan suatu jaringan dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain di dunia ini.

Tabel 1. 1 Indikator Statistik Digital pada Negara Indonesia

Indikator Statistik Digital Indonesia		
Total Populasi 265.4 Juta	Pengguna Internet 132.7 Juta	Pengguna Aktif Media sosial 130 Juta
Penetrasi 56%	Penetrasi 50%	Penetrasi 49%

*Sumber: (Global Digital Report, 2018)*

Menurut data dari Global Digital Report 2018, jumlah populasi di Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 56% dari total populasi merupakan pengguna internet. 130 juta jiwa atau 49% dari total populasi aktif menjadi pengguna media sosial di Indonesia dan 50% dari populasi Indonesia atau sekitar 132,7% juta jiwa yang aktif menjadi pengguna internet. Berdasarkan data tersebut, Indonesia termasuk negara dengan penduduk yang aktif dalam penggunaan internet di era digital ini.

Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun pun terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari data Tabel Pertumbuhan Pengguna Internet dari tahun 2011 – 2017 berikut:

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia

Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia	
2011	55 juta
2012	63 juta
2013	82 juta
2014	88 juta
2015	110 juta
2016	133 juta
2017	143 juta

*Sumber: APJII 2017*

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2011-2017. Pada tahun 2011, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 55 juta orang dan sampai pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan hingga 143 juta orang.

Pada penelitian ini mengambil hasil data penetrasi survey APJII 2017 pengguna internet yang dilihat berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Berikut dibawah ini merupakan data-data yang dirangkum pada tabel:

Tabel 1. 3 Komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	
<b>2016</b>	
Pria	Wanita
51,8%	48,2%
<b>2017</b>	
Pria	Wanita
51,4%	48,6%

*Sumber: APJII 2017*

Menurut hasil survey APJII 2017 pada tabel 1.3 komposisi pengguna internet berdasarkan jenis kelamin di Indonesia diatas adalah pengguna internet tahun 2016 dengan jenis kelamin pria memiliki persentase sebesar 51,8% dan pengguna internet dengan jenis kelamin wanita memiliki persentase sebesar

48,2%. Pengguna internet tahun 2017 dengan jenis kelamin pria memiliki persentase sebesar 51,4% dan pengguna internet dengan jenis kelamin wanita memiliki persentase sebesar 48,6%. Dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 mayoritas dari kalangan pria.

Tabel 1. 4 Komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Pendidikan Terakhir

<b>Pengguna Internet Berdasarkan Pendidikan Terakhir</b>					
Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	S1/Diploma	S2/S3
5,45%	25,10%	48,53%	70,54%	79,23%	88,24%

*Sumber: APJII 2017*

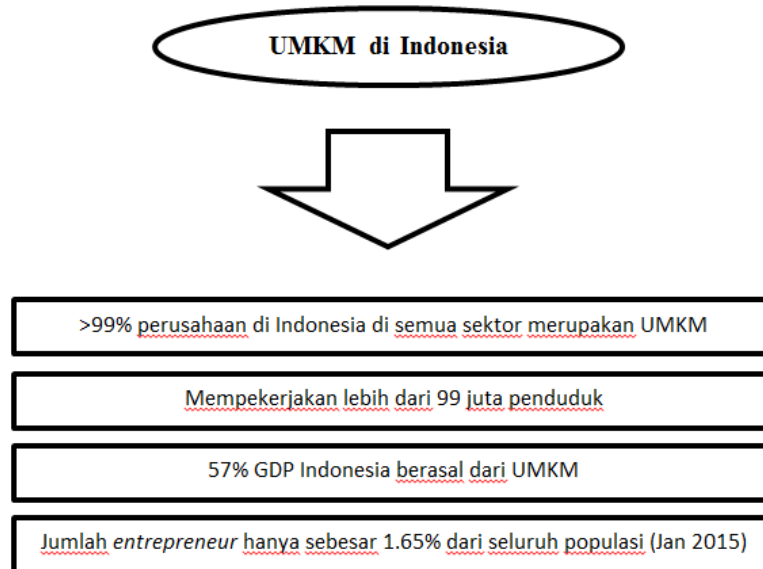
Menurut hasil survey APJII 2017 pada tabel 1.3 komposisi pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikan terakhir diatas bahwa lulusan S2/S3 memiliki persentase terbesar pada komposisi pengguna internet di Indonesia dengan persentase sebesar 88,24% dan persentase terkecil pada pada pengguna interenet yang tidak bersekolah yaitu 5,45%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia mayoritas merupakan masyarakat dengan pendidikan tinggi yaitu lulusan S2/S3, disusul oleh S1/Diploma, kemudian SMA, lalu SMP, SD.

Internet telah berkembang dengan pesat sehingga tidak hanya digunakan sebagai mencari informasi ataupun komunikasi, tetapi sudah merambah ke dunia bisnis. Pengguna internet untuk bisnis inilah yang merubah fungsi internet sebagai alat untuk bertukar informasi secara digital menjadi alat untuk strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan serta pelayanan pelanggan (Irmawati, 2011). Dengan kemajuan teknologi saat ini, muncul beberapa peluang bisnis yang memanfaatkan internet dan perangkat digital sebagai sarana bisnisnya.

Banyaknya UMKM yang menggunakan media digital sebagai sarana untuk berbisnis. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (Maryati,2014). UMKM di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu pilar perekonomian yang tangguh



apabila mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Kondisi UMKM di Indonesia akan dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 1. 3 Kondisi UMKM di Indonesia

*Sumber: Kemenkop UKM 2015*

Berdasarkan pada gambar 1.3 di atas bahwa UMKM menyerap lebih dari 99 juta tenaga kerja. UMKM juga menyumbang 57% terhadap GDP Indonesia. Jumlah wirausaha di Indonesia hanya mencapai 3,1 % dari seluruh populasi. (Liputan6, 2018)

Menurut (Sindonews, 2017) dalam artikelnya yang berjudul Menuju Era Ekonomi Digital, UMKM didorong *Go Online* (2017), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini semakin pesat dan meluas. Dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi di era digital ini diharapkan dapat di manfaatkan oleh UMKM. Melalui visi ini ingin dicapai kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM yang disebut sebagai representasi ekonomi rakyat yang dapat menyerap tenaga kerja sekitar 90% serta memberikan kontribusi sebesar 58% pada Produk Domesik Bruto (PDB) Nasional. Terlebih lagi, hasil survey menunjukkan, berjualan secara *online* dapat meningkatkan pendapatan UMKM hingga 26% dan meningkatkan penyerapan kerja yang berimbas pada peningkatan ekonomi nasional secara berkala dan bertahap.

Pertumbuhan UMKM menjadi potensi dan peluang untuk dikembangkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah, Pemerintah sepakat bahwa UMKM harus dilindungi, karena merupakan salah satu inti dalam ketahanan ekonomi Indonesia. (Kominfo, 2016). Dalam memaksimalkan pengembangan UMKM, pemerintah menggelontarkan dana kemitraan mencapai Rp 3,2 triliun. Dana tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk pengembangan usahanya. Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan jumlah UMKM untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat berupa terciptanya lapangan kerja baru, Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan ada tiga masalah klasik pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi di Jawa Barat sehingga sulit maju, yakni ketersediaan bahan baku, manajemen, dan pemasaran, dalam menghadapi hambatan UMKM salah satu solusi yang diberikan adalah dengan mengadakan pelatihan (Nursanti, 2019).

Kota Bandung menjadi salah satu kota kreatif di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya Kota Bandung menjadi tuan rumah Bekraf Festival tahun 2017. Kota Bandung memiliki potensi dilihat dari banyak komunitas, festival, hingga sarana dan prasarana di Kota Bandung yang sangat mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Kota Bandung fokus pada ekonomi kreatif, jasa, dan pariwisata (Naufal, 2019). Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, jumlah akomodasi hotel bintang dan nonbintang di Kota Bandung pada tahun 2017 sebanyak 345 dengan jumlah kamar sebanyak 17.545 kamar. Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 173.036 orang, sedangkan jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi Kota Bandung pada 2016 sebanyak 4.827.589 orang (Naufal,2019). Melihat dari potensi perkembangan wirausaha Kota Bandung pemerintah kota Bandung menetapkan keberadaan wirausaha sebagai salah satu sasaran pembangunan yang harus dicapai dalam jangka menengah.

Dikutip dari pernyataan SETDA Kota Bandung dalam Laporan Sistem Informasi Program Percepatan dan Penciptaan Wirausaha Baru Berbasis Web

bahwa Kota Bandung berpotensi besar dalam penciptaan wirausaha baru karena memiliki industri kreatif yang sangat kondusif, dalam mengembangkan para pelaku usaha pemerintah Kota Bandung memiliki masalah yaitu tidak dapat berjalan sendiri dalam penciptaan wirausahawan baru tersebut. Dikutip dari usulan teknis pelaksanaan program wirausaha baru Kota Bandung tahun 2019 Pemerintah Kota Bandung bersama Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung menyepakati terbitnya Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2013 - 2018 yang memuat target terciptanya 100.000 wirausaha di kota Bandung sampai dengan 2018. Dalam rangka mencapai target tersebut Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota No. 1090 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru. Dalam mempermudah pengembangan UMKM ,

Terdapat lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merealisasikan program Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018 tentang percepatan wirausaha yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan, Dispora, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil forum kewirausahaan tahun 2017 dibawah Wali Kota yang bertugas memantau program percepatan wirausaha, ditemukan bahwa adanya pelatihan yang berjalan kurang efektif. Berdasarkan Laporan Usulan Teknis Pelaksanaan Program Wirausaha Baru Kota Bandung 2019 diketahui bahwa jumlah partisipan UMKM yang mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. berikut data pencapaian pelatihan wirausaha sejak awal dijalankan :

Tabel 1. 5 Data Pencapaian Pelatihan Wirausaha Kota Bandung 2019

No.	SKPD	TARGET	REALISASI			JUMLAH REALISASI	KETERANGAN
			2015	2016	2017		
1	Dinas KUMKM	35.000	5.414	5.112	1.000	11.526	-
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.500	-	558	1000	1.556	Tahun 2015 belum memberikan data

3	Dinas Pangan dan Pertanian	1.000	150	-	180	330	Tahun 2016 belum memberikan data
4	Dinas Tenaga Kerja	7.500	1.340	1.120	1.060	3.520	-
5	Dinas Pendidikan	53.000	7.341	835	2000	10.176	-
	Jumlah	100.000	14.245	7.625	5.240	27.110	-

*Sumber: Laporan Usulan Teknis Pelaksanaan Program Wirausaha Baru Kota Bandung 2019*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jarak antara target dan realisasi masih terpaut sangat jauh. Hal ini menandakan bahwa diperlukan adanya perubahan berupa perbaikan yang signifikan mengenai pelaksanaan Program Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru.

Pada tahun 2019, program percepatan wirausaha melalui pelatihan digantikan dengan program pendampingan usaha untuk periode Wali Kota baru tahun 2019-2024. Dikutip dari pernyataan SETDA Kota Bandung dalam Laporan Sistem Informasi Program Percepatan dan Penciptaan Wirausaha Baru Berbasis Web bahwa salah satu tindak lanjut dalam program pendampingan usaha untuk periode Wali Kota baru tahun 2019-2024 yaitu akan membuat sistem informasi berbasis web sebagai media bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengakses informasi terkait program WUB yang dilakukan oleh 5 SKPD sekaligus fasilitas untuk mendaftar keikutsertaan program WUB. Pada rencana program berbasis web yang nantinya mengharuskan setiap wirausaha untuk mendaftar secara *online*.

Penelitian ini akan meneliti Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan dinas yang menaungi UMKM di Kota Bandung. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung membawahi 441 pelaku usaha UMKM untuk dibina dalam mengembangkan bisnisnya (Rikrik, 2018). Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam membina

UMKM, salah satunya dengan memberi pelatihan dalam meningkatkan kualitas dari UMKM.

Berdasarkan hasil dari pertemuan dengan Ibu Rikrik selaku Kasi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung bahwa di lapangan belum adanya pelatihan tentang teknologi digital.

Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu pelaku usaha UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2017. Dari beberapa fenomena di atas, menarik perhatian penulis apakah pelaku usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung sudah siap untuk masuk ke dunia digital ini, yang mana menurut sumber Ibu Rikrik selaku Kasi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung bahwa belum mengadakan pelatihan mengenai penggunaan internet maupun tentang teknologi digital. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan analisis kesenjangan digital pada pelaku usaha UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dengan dilihat dari penggunaan internet sehari-hari.

Dalam penelitian terdahulu oleh Milioni dkk (2014) membahas mengenai kesenjangan digital dalam hal akses dan pemakaian (*in access and in use*) berdasarkan penggunaan internet dan sosiodemografi dasar. Pada penelitian ini penulis meneliti kesenjangan digital pada UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung berdasarkan sosiodemografi dan kegiatan *online* yang biasa dilakukan pelaku usaha UMKM tersebut.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada penelitian terdahulu Milioni (2014) meneliti kesenjangan digital pada pengguna internet usia muda di Cyprus, maka pada penelitian ini penulis tertarik untuk membahas mengenai kesenjangan digital dalam penggunaan internet pada pelaku usaha UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Berdasarkan fenomena yang terjadi saat penelitian ini dilakukan, maka penulis akan melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Analisis Kesenjangan Digital Pada UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun 2017”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil forum kewirausahaan tahun 2017 dibawah Wali Kota pada program percepatan wirausaha, ditemukan bahwa adanya pelatihan yang berjalan kurang efektif karena jumlah partisipan UMKM yang mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Pada tahun 2019, program percepatan wirausaha melalui pelatihan digantikan dengan program pendampingan usaha untuk periode Wali Kota baru tahun 2019-2024. Salah satu tindak lanjut dalam program pendampingan usaha untuk periode Wali Kota baru tahun 2019-2024 yaitu akan membuat sistem informasi berbasis web sebagai media bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengakses informasi terkait program WUB sekaligus fasilitas untuk mendaftar keikutsertaan program WUB. Sehingga nantinya mengharuskan setiap para pelaku usaha untuk mendaftar secara *online*.

Akan tetapi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung belum mengadakan pelatihan mengenai penggunaan internet maupun tentang teknologi digital. Sedangkan kedepannya akan dibuat sistem informasi berbasis web untuk mengakses informasi terkait program WUB sekaligus fasilitas untuk mendaftar keikutsertaan program WUB yang mana setiap pelaku usaha harus mendaftar secara *online*.

Dengan adanya analisis dari penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan digital pada pelaku usaha UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam hal akses dan pemakaian (*access and use*) dengan melihat berapa besar kesenjangan digital berdasarkan *sociodemographics* dan *online activities*.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat kesenjangan digital pada UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung?

2. Seberapa besar kesenjangan digital pada UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung berdasarkan *sociodemographics* dan *online activities*?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan digital pada UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui berapa besar kesenjangan digital UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung berdasarkan *sociodemographics* dan *online activities*.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

#### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis, dimana hasil penelitian ini akan ditunjukkan untuk mengetahui seberapa penting teknologi di era digital ini, terutama untuk pelaku usaha UMKM yang sedang menjalankan usahanya. Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan manfaat yang selanjutnya dapat digunakan dalam peninjauan teori baik untuk pengetahuan maupun penelitian yang berkelanjutan.

#### **1.6.2 Aspek Praktis**

Manfaat praktisi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga nasional di Indonesia untuk membantu kalangan yang kurang pemahaman akan penggunaan teknologi, seperti menyelenggarakan pelatihan terkait dengan pentingnya teknologi serta penggunaan perangkat digital. Hal ini diharapkan dapat menjangkau wilayah yang luas serta berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah tentang analisis kesenjangan digital pada UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun 2017. Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti kesenjangan digital pada pelaku usaha UMKM

(individu) bukan pada dinas atau usaha dari wirausaha tersebut. Adapun batasan – batasannya adalah sebagai berikut.

- a) Objek penelitian adalah UMKM yang binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun 2017
- b) Periode penelitian dimulai pada bulan September 2018 dan berakhir pada bulan April 2019.
- c) Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis mengambil sampel dari UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

### **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian**

Teori-teori yang relevan dan dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Selain itu dibahas pula mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik pembahasan atau masalah penelitian.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

#### **BAB IV Analisis Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah tujuan penelitian.

#### **BAB V Kesimpulan**

Isi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta berisi saran yang diberikan penulis baik untuk aspek teoritis maupun aspek praktis.



